

Analisis implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap Imigran gelap terkait Pasal 48 dan 53 Undang Undang No: 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian = Analysis on immigration's crime act investigation policy toward Illegal migrant concerned The Article of 48 and 53 of Act No. 9/1992 on Immigration

Mohamad Soleh, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20342223&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap Imigran Gelap terkait Pasal 48 dan Undang Undang No, 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Karena implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap imigran gelap ini bersinggungan dengan aspek internasional, maka pemahaman imigran gelap dibahas dari sisi teoritis dan aspek-aspek hukum dan dikaitkan dengan yurisdiksi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk mendapatkan sumber data primer yang dilakukan terhadap informan yang terdiri dari para pejabat dan penyidik di lingkungan Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian. Selain metode wawancara mendalam juga dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner, dan laporan- laporan kegiatan di lingkungan Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Untuk mendapatkan data sekunder. Dari analisis data hasil wawancara, dapat disimpulkan beberapa hal bahwa: 1) Rendah/lemahnya implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap imigran gelap terkait pasal 48 dan 53 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebabkan adanya kelemahan 4 faktor implementasi kebijakan yaitu; Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; 2) Lemahnya faktor komunikasi disebabkan oleh karena tidak pernah adanya sosialisasi mengenai pemahaman imigran gelap dalam konteks TPK baik kepada masyarakat dan juga aparat imigrasi sendiri dan tidak pernah ada penyampaian arahan atau instruksi yang bersifat terbuka/langsung, terpol, dan jelas; (tidak ambigu) mengenai persoalan penyidikan TPK terhadap imigran gelap dari Dirjen kepada pejabat atau penyidik di lingkungan Subdit Penyidikan; 3) Lemahnya faktor sumber daya disebabkan karena pendistribusian dan penempatan staf yang tidak merata dan salah, serta sangat terbatasnya kewenangan yang dimiliki pejabat atau penyidik dalam melaksanakan kebijakan penyidikan TPK terhadap imigran karena adanya benturan internal (kebijakan Negara; Menteri/Presiden, dan imigrasi sendiri) dan internasional (etika dan kebiasaan tradisi internasional, dan lembaga-lembaga internasional); 4) Lemahnya faktor disposisi disebabkan karena tidak adanya insentif bagi pejabat atau penyidik yang berdedikasi, dan; 5) Kecenderungan lemahnya faktor struktur birokrasi dalam hal belum adanya prosedur kerja JSOPs yang bersifat khusus (bersifat umum) mengenai Imigran gelap dalam konteks TPK dan pembagian kerja yang ada di Subdit Penyidikan masih bersifat kurang efektif.

<hr>

The focus of this study is Analysis on Immigration's Crime Act Investigation policy toward Illegal Migrant Concerned The Article of 48 and 53 of Act No. 9/1992 on Immigration. While the implementation of immigration's crime act investigation policy toward illegal migrant has relation with international aspect, so does the understanding of illegal migrants will be discussed of a theoretical side and law's norm aspects and also to be related with state jurisdiction. This research is using qualitative method with descriptive design.

The data collection on this research is collected by means of deep interview to obtain primary data from informants, they are officials and investigators in Sub Directorate Investigation environment. Apart from deep interview method, the data collection' also to be collected by means of questionnaire, and activity reports in Sub Directorate Investigation, to obtain secondary data. From the interview's data analysis, the conclusions are following; 1) The low implementation of immigration's crime act investigation policy is caused by 4 factors of implementing policy they are; communication, resources, disposition, bureaucracy structure; 2) The low communication factor is caused by there's no any socialization about illegal migrant understanding in the context of immigration's crime act, either publics or self-immigration aparatur and there's no conveying directives or instructions or orders having a direct way or indirect way, a fixed patten and a clear meaning (no ambiguity or ambivalence) concerning the problem of immigration's crime act investigation policy toward iHegal migrant by Director General Immigration to officials or investigators in Sub Directorate Investigation; 3) The low resource factor is caused by the distribution .and the placement of staffs not to throughout every place and wrong places, and also the limited authority of officials or investigator in doing immigration's crime act investigation policy toward illegal migrant caused by internal clash (state's policy; Minister or President) and international (ethic and custom of international traditions, and international institutions) 4) The low disposition aspect is caused by no any incentive for officials or investigators having high dedication, and; 5) There's an inclination of bureaucracy structure factor become less effective. It's caused by no special SOPs concerning illegal migrant in immigration's crime act context and also fragmentation being in Sub Directorate Investigation is still less effective.